

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan memiliki kaitan erat dengan lingkungan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan operasional perusahaan yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Namun perusahaan terkadang mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat dengan mengeksploitasi sumber daya alam dalam memkasimalkan keuntungan untuk kepentingan *shareholder* semata. Orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari orientasi untuk *shareholder* dengan bertitik tolak pada ukuran kinerja ekonomi semata, ke arah kesinambungan lingkungan dan masyarakat dengan mempertimbangkan dampak sosial (Hadi, 2011).

Semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka semakin banyak dampak yang dihasilkan, terutama perusahaan yang memiliki kegiatan operasional yang berhubungan langsung dengan alam, salah satu contohnya yaitu perusahaan pertambangan. Dampak-dampak tersebut lebih cenderung ke arah negatif, sehingga pemerintah menerapkan sistem tanggung jawab sosial perusahaan. Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi perhatian banyak pihak,

dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang semakin kritis atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas.

Tanggung jawab sosial perusahaan berasumsi bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan *shareholder* tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan (*stakeholder*), termasuk di dalamnya adalah *customers*, pegawai, komunitas (masyarakat), pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor (Rustiarini, 2011).

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di dalam perusahaan diwujudkan dengan pengungkapan pertanggungjawaban pada *annual report* maupun *sustainability report*.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial sangat penting bagi *shareholder* ataupun *stakeholder*. Calon investor akan lebih memilih perusahaan yang menjalankan program pertanggungjawaban sosial secara berkelanjutan karena perusahaan akan mendapatkan simpati dari masyarakat dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini memberikan keuntungan jangka panjang untuk perusahaan, khususnya *shareholder*. Bagi *stakeholder*, pengungkapan pertanggungjawaban sosial penting karena *stakeholder* membutuhkan informasi dan bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pemilik perusahaan yang berbeda akan memiliki tujuan dan pola pengambilan keputusan yang berbeda (Hoskisson et al., 2002). Perusahaan yang mempunyai

struktur kepemilikan yang terdispersi, pada umumnya akan memperbaiki kebijakan pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi, sedangkan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terpusat pada umumnya kurang termotivasi untuk mengungkapkan informasi tambahan pada kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan. Hal ini dikarenakan para *shareholder* pada perusahaan tersebut dapat memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan (Reverte, 2008). Pemegang saham memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan jangka panjang perusahaan, maka mereka akan berusaha memaksimalkan tidak hanya kondisi ekonomi perusahaan, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan saham dipisahkan menjadi tiga yang mengacu pada penelitian Rustiarini (2011), yaitu kepemilikan asing, manajerial dan kepemilikan institusional. Namun, kepemilikan institusional dibagi menjadi dua, yaitu institusional BUMN dan institusional Non-BUMN.

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing di dalam suatu perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki *stakeholder* yang lebih banyak dibanding perusahaan berbasis nasional sehingga permintaan informasi juga lebih besar dan dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen

perusahaan (Rustiarini, 2011). Manajer memiliki pengetahuan yang sangat memadai atas aktivitas perusahaan dan memiliki pengaruh yang besar pada strategi yang dijalankan perusahaan (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar (Rustiarini, 2011). Kepemilikan institusional formal dibagi menjadi dua bagian, yaitu institusional BUMN dan Non-BUMN. Definisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan BUMN dapat pula berupa [perusahaan nirlaba](#) yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Sedangkan institusional Non-BUMN adalah institusi berbadan hukum yang dibentuk oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok.

Kepemilikan saham oleh pihak asing lebih dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman modal asing semakin ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan kelangsungan pembangunan nasional yang membutuhkan banyak dana dan tidak hanya dapat dicukupi oleh pemerintah ataupun pihak swasta nasional, namun juga dibutuhkan dari investor asing. Kepemilikan saham oleh investor asing pada perusahaan nasional maupun multinasional sangat membutuhkan dukungan dari *stakeholder* agar kelangsungan usaha dapat berjalan lancar dan berjangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan semaksimal mungkin melakukan pengambilan keputusan yang tidak merugikan serta melakukan

berbagai kegiatan untuk mendapatkan simpati yang besar dari *stakeholder*, salah satunya yaitu dengan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan dan diungkapkan secara luas. Perusahaan berbasis asing biasanya juga memiliki permintaan pengungkapan informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan nasional (Rustiarini, 2011).

Selain terdapat kepemilikan asing, di dalam perusahaan juga terdapat kepemilikan manajerial. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer, maka tindakan yang diambil akan cenderung dari perspektif pemilik. Dengan keterlibatan manajer dalam kepemilikan saham perusahaan, atau lebih dikenal dengan *bonding strategy*, maka manajer akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambil (Sofyaningsih dan Hardiningsih, 2011). Hal ini secara langsung juga dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik dan terdapat peningkatan nilai perusahaan, memungkinkan manajer mengambil keputusan untuk terus melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dan mengungkapkannya secara luas. Namun jika kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan buruk, maka memungkinkan manajer mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu *income smoothing* dengan mengurangi biaya-biaya agar nilai pendapatan dapat lebih tinggi, termasuk biaya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pihak institusional biasanya memiliki saham secara mayoritas dan berjangka panjang. Oleh karena itu, investor memiliki kepentingan tidak hanya pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga pada strategi dan aktivitas sosial yang akan

berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Saleh et al., 2010). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan mengurangi perilaku *opportunistic* manajer yang dapat mengurangi *agency cost* yang diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (Wahyudi et al., 2006). Perusahaan yang dimiliki oleh institusi BUMN memiliki standar kinerja tinggi dengan mengedepankan kepentingan *stakeholder*, terutama masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari institusi BUMN adalah untuk memberikan pendapatan kepada negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mensejahterakan masyarakat luas. Oleh karena itu, perusahaan akan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dengan konsisten dan mengungkapkannya secara luas. Sedangkan institusi Non-BUMN juga dapat mempengaruhi pelaksanaan dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini disebabkan karena aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan.

Penelitian ini memperluas penelitian dari Rustiarini (2011) dengan tujuan menguji pengaruh struktur kepemilikan saham pada aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang diprosikan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat perhitungan bias dan juga diperkirakan *leverage* dan ukuran perusahaan ikut berpengaruh di dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sampel penelitian mengambil perusahaan pertambangan karena memiliki aktivitas operasional yang berhubungan dan berdampak langsung pada sumber daya alam dan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk perseroan terbatas yang diwajibkan melaksanakan

program tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut

“pengaruh kepemilikan saham asing, manajerial dan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.”

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

1.2.2 Batasan Masalah

Peneliti mempersempit batasan masalah dalam penelitian dengan hanya menggunakan tiga jenis kepemilikan saham, yaitu kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institutional karena mayoritas kepemilikan di dalam perusahaan adalah ketiga jenis kepemilikan tersebut.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji serta menyediakan bukti empiris bahwa kepemilikan saham berpengaruh dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dinilai melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan bukti empiris bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
2. Memberikan masukan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan serta mengungkapkannya secara luas di dalam *annual report* maupun *sustainability report*.
3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan oleh perusahaan, sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan dan menetapkan standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.